

## Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah

(Studi Kasus: BPPKAD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020)

Agus Putri Mulyaningsih<sup>1</sup>,  
Suci Nasehati Sunaningsih<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi<sup>1</sup>, Program Studi Akuntansi<sup>2</sup>  
Fakultas Ekonomi<sup>1</sup>, Fakultas Ekonomi<sup>2</sup>  
Universitas Tidar<sup>1</sup>, Universitas Tidar<sup>2</sup>

[agusputrimulyaningsih@gmail.com](mailto:agusputrimulyaningsih@gmail.com), [sucinasehati@untidar.ac.id](mailto:sucinasehati@untidar.ac.id)

**Received:** May 30, 2022 **Revised:** June 25, 2022 **Accepted:** July 21, 2022. **Issue Period:** Vol.6 No.3 (2022), Pp. 612-622

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya studi adalah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang selama empat tahun anggaran yaitu tahun 2017 – 2020. Teknik analisis data yang difungsikan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas & efisiensi, aktivitas belanja, dan pertumbuhan. Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang difungsikan dalam studi ini. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Metode dokumentasi difungsikan untuk memperoleh data penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa rasio kemandirian sebesar 19,02% tergolong instruktif, rasio efektivitas memperoleh nilai 102,33% tergolong sangat efektif, rasio efisiensi memperoleh nilai 78,29% tergolong efisien, rasio aktivitas yang terbagi menjadi rasio belanja operasi memperoleh nilai 77,71% dan rasio belanja modal memperoleh nilai 21,23%, serta rasio pertumbuhan yang terbagi menjadi rasio pertumbuhan PAD memperoleh nilai -4,02%, rasio pertumbuhan pendapatan memperoleh nilai 1,89%, rasio pertumbuhan belanja operasi memperoleh nilai -2,05%, dan rasio pertumbuhan belanja modal memperoleh nilai -22,57%. Dengan perolehan hasil tersebut, alangkah baiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan belanja modal guna mendukung penyediaan terhadap sarana dan prasarana fasilitas publik yang mendorong perekonomian daerah.

**Kata kunci:** Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas & Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan

**Abstract:** This study aims to measure the financial performance of the Magelang Regency Government for four fiscal years 2017 – 2020. The data analysis techniques used are the ratio of regional financial independence, effectiveness & efficiency, activities, and growth. Qualitative descriptive is the type of this study. The data used is in the form of the Magelang Regency APBD Realization Report. Documentation method is used to obtain research data. The yield of this study show that the independence ratio of 19.02% is belong to instructive relationship pattern, the effectiveness ratio is 102.33% with very effective explanation, the efficiency ratio is 78.29% with efficient explanation, the activity ratio which is divided into operating expenditure ratio of 77.71% and capital expenditure ratio of 21.23%, as well as the growth ratio divided into PAD growth ratio of -4.02%, revenue growth ratio of 1



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

.89%, operating expenditure growth ratio of -2.05%, and capital expenditure growth ratio of -22.57%. With these results, it would be better if the Regional Government of Magelang Regency optimizes regional potential to increase regional income and increase capital expenditures to support the provision of public facilities and infrastructure that encourage the regional economy.

**Keywords:** Independence Ratio, Effectiveness & Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio

## I. PENDAHULUAN

Organisasi yang bertugas di ranah pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam upaya untuk menjalankan konstitusi negara merupakan organisasi sektor publik. Lembaga - lembaga negara / pemerintahan merupakan bentuk dari organisasi sektor publik. Akuntansi dan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat yang berguna untuk pengambilan keputusan dan penilaian kinerja organisasi. Tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah membuat laporan keuangan yang bersifat eksternal, seperti Laporan Surplus/Defisit, LRA, Laporan Laba/Rugi, LAK, Neraca, dan Laporan Kinerja. Tuntutan tersebut memberikan pemikiran bahwa peran utama akuntansi dalam sektor publik adalah menyiapkan laporan keuangan untuk mewujudkan terlaksananya akuntabilitas publik [1]. Menurut Sayuti et al. laporan keuangan yang disusun harus jujur sebagai wujud transparansi adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya publik [2].

Otonomi daerah merupakan penyerahan hak, wewenang, dan kewajiban yang dilakukan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar daerah otonom dapat mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya [3]. Kebijakan otonomi daerah memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah agar bisa secara tepat mengalokasikan keuangan daerah yang didapat dari pemanfaatan terhadap kemampuan dan kekuatan daerah secara mandiri yang kelak digunakan untuk pembangunan daerah [4]. Penerapan otonomi daerah dilatarbelakangi atas ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengurus seluruh pembangunan daerah sehingga dilakukanlah pelimpahan kekuasaan dan wewenangnya kepada pemerintah daerah guna mengelola secara mandiri kepentingan daerahnya [5].

Menurut Rondonuwu et al, Laporan Keuangan APBD bisa menunjukkan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti kemampuan membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial, dan penerimaan pendapatan daerahnya [6]. Pemerintah daerah wajib melaporkan laporan pertanggungjawabannya atas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya transparansi kinerja pemerintahan dalam mengelola keuangan daerahnya agar mengetahui kesesuaian dengan pendapatan yang diperoleh daerah dan ketepatan pengalokasian sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat [7].

Kinerja bisa dimaknai sebagai representasi tentang seberapa tinggi tingkat keberhasilan terhadap program ataupun kebijakan yang dilaksanakan sesuai visi misi organisasi, tujuan, dan sasaran yang umumnya tertera dalam perencanaan strategis organisasi. [8]. Indikator penilaian kinerja pemerintah daerah bisa diukur dengan mempergunakan kinerja keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan sangat diperlukan guna mengetahui kesesuaian alur keuangan pemerintah daerah dengan berpedoman pada laporan keuangan pemerintah daerah tersebut [9]. Menurut Halim, salah satu indikator yang dapat difungsikan guna melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerahnya bisa dilakukan menggunakan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti rasio efisiensi, kemandirian, efektifitas, dan pertumbuhan [10].

Penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis rasio telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Salwa Qur'ani dengan objek penelitian Pemerintah Kota Magelang tahun 2015 – 2019 yang memperoleh hasil bahwa kemandirian daerah menunjukkan nilai yang rendah sehingga masih dianggap tidak mandiri, sudah efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang tidak efisien karena Pemerintah Kota Magelang belum bisa menekan jumlah belanja daerahnya, rasio aktivitas belanja tergolong tidak efisien, persentase antara belanja

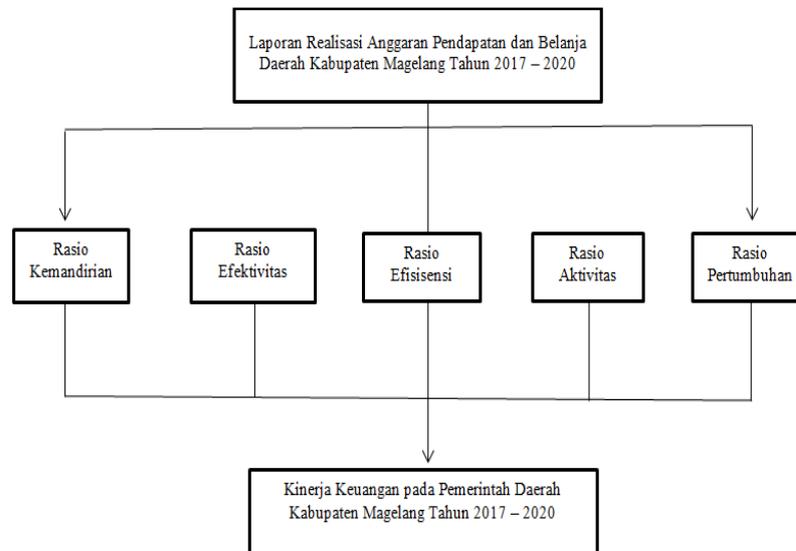


operasional dan belanja modal kurang harmonis, dan pertumbuhan daerah Kota Magelang masih rendah [11]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi dengan objek instansi yang berbeda yaitu BPPKAD Kabupaten Magelang. Tujuan dari dilakukannya studi adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan Kabupaten Magelang. Studi yang dilakukan bisa berguna untuk memberikan penilaian atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam mengalokasikan pendapatan yang diperolehnya.

## II. METODE DAN MATERI

### 2.1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder sebagai sumber penelitian. Data kuantitatif dimaksudkan sebagai data yang berisi angka – angka yang diperoleh melalui perhitungan dengan pemberian variable [12]. Metode dokumentasi difungsikan dengan cara menghimpun data – data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbentuk Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 yang diperoleh melalui website <http://sibata.magelangkab.go.id> [13]. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk menguji data yang terkumpul guna memperoleh jawaban studi. Untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan lima jenis rasio sebagai tolak ukur dalam melakukan teknik analisis data, yaitu 1) rasio kemandirian, 2) efektifitas dan 3) efisiensi, 4) aktivitas, dan 5) pertumbuhan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 2.2. Rasio Kemandirian

Rasio yang mempresentasikan hasil perhitungan antara perbandingan PAD dengan Dana Perimbangan dapat didefinisikan sebagai rasio kemandirian. Berikut adalah rumus yang difungsikan guna menghitung rasio kemandirian [14]:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel berikut mempresentasikan kriteria dari hasil pengukuran rasio kemandirian [14]:

Tabel 1. Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

| Rasio Kemandirian (dalam %) | Kriteria | Pola Hubungan |
|-----------------------------|----------|---------------|
|-----------------------------|----------|---------------|



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 0 – 25              | Rendah Sekali | Instruktif   |
| Lebih dari 25 – 50  | Rendah        | Konsultatif  |
| Lebih dari 50 – 75  | Sedang        | Partisipatif |
| Lebih dari 75 – 100 | Tinggi        | Delegatif    |

Sumber: Halim, 2007

### 2.3. Rasio Efektivitas

Rasio yang mempresentasikan tentang kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan dibanding dengan target PAD yang telah ditetapkan berdasarkan pada kemampuan atau kekuatan riil daerah yang dimilikinya dapat diartikan sebagai rasio efektivitas [14]. Berikut adalah rumus yang difungsikan guna menghitung rasio efektivitas [15]:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel berikut mempresentasikan kriteria pengukuran rasio efektivitas [16] :

Tabel 2. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

| Kinerja Keuangan (dalam %)       | Kriteria       |
|----------------------------------|----------------|
| Lebih dari 100                   | Sangat Efektif |
| Lebih dari 90 – 100              | Efektif        |
| Lebih dari 80 – 90               | Cukup Efektif  |
| Lebih dari 60 – 80               | Kurang Efektif |
| Kurang dari atau sama dengan 60% | Tidak Efektif  |

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

### 2.4. Rasio Efisiensi

Rasio yang mempresentasikan hasil perhitungan antara perbandingan terhadap realisasi belanja dengan pendapatan merupakan definisi dari rasio efisiensi. Tingkat produktivitas suatu daerah berkaitan erat dengan hasil perhitungan rasio efisiensi. Berikut ini adalah rumus yang difungsikan guna menghitung rasio efisiensi [17]:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel berikut mempresentasikan kriteria pengukuran rasio efisiensi [18]:

Tabel 3. Kriteria Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

| Kinerja Keuangan (dalam %) | Kriteria       |
|----------------------------|----------------|
| Lebih dari 100             | Tidak Efisien  |
| Lebih dari 90 - 100        | Kurang Efisien |
| Lebih dari 80 - 90         | Cukup Efisien  |
| 60 - 80                    | Efisien        |
| Kurang dari 60             | Sangat Efisien |



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

Sumber: Mahmud, 2011

### 2.5. Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja

Rasio keserasian mencakup dua perhitungan yang meliputi belanja operasional dan modal. Rasio terhadap belanja operasional mempresentasikan hasil analisis pengukuran antara total belanja rutin daerah dengan total belanja. Sedangkan rasio belanja modal mempresentasikan perhitungan antara total belanja modal daerah dengan total belanja. Apabila pemerintah lebih banyak menganggarkan dana yang dimilikinya untuk belanja rutin, hal ini akan berdampak pada sedikitnya dana yang dialokasikan pada pos belanja modal untuk memenuhi pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan daerah. Sejauh ini, belum ada aturan yang secara tepat untuk mempresentasikan berapa perbandingan rasio yang tepat antara pengukuran belanja rutin terhadap belanja modal yang optimum. Jika suatu daerah mendapatkan total perhitungan rasio belanja modal yang kecil, daerah tersebut sangat penting menaikkan total belanja modal daerahnya agar bisa menjalankan pemenuhan atas tuntutan mewujudkan pembangunan yang ditargetkan oleh daerahnya.

Berikut ini adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio belanja operasi [19]:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (4)$$

Berikut adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio belanja modal [19]:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \quad (5)$$

### 2.6. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang mempresentasikan besarnya kecilnya tingkat kemampuan suatu daerah dalam rangka menjaga kestabilan dan menaikkan keberhasilan daerah yang telah diperoleh berdasarkan periode sebelumnya terhadap periode berikutnya merupakan rasio pertumbuhan. Rasio ini diperlukan guna mengevaluasi berbagai potensi daerah yang perlu diperhatikan. Rasio pertumbuhan daerah ini didapatkan dari perbandingan antara realisasi penerimaan PAD/pendapatan/belanja operasional/ belanja modal tahun ke-n dengan realisasi penerimaan PAD/pendapatan/belanja operasional/belanja modal tahun ke-0 (suatu lambang untuk tahun sebelum n). Ringkasnya, berikut adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio pertumbuhan [19]:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \quad (6)$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

$P_n$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal pada tahun ke-n

$P_o$  = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Operasi/Belanja Modal pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis

#### 3.1. Rasio Kemandirian



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 tersaji pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Tahun       | Realisasi PAD      | Pendapatan Transfer  | Rasio Kemandirian | Pola Hubungan |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 2017        | Rp 403.561.238.310 | Rp 1.863.973.265.873 | 21,65%            | Instruktif    |
| 2018        | Rp 325.089.093.092 | Rp 1.887.644.229.675 | 17,22%            | Instruktif    |
| 2019        | Rp 417.178.099.961 | Rp 2.063.644.057.920 | 20,22%            | Instruktif    |
| 2020        | Rp 329.769.193.224 | Rp 1.940.323.473.805 | 17,00%            | Instruktif    |
| Rata – Rata |                    |                      | 19,02%            | Instruktif    |

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel di atas memperlihatkan secara jelas tentang hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang, diawali tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 21,65%, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 17,22%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 20,22%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 17,00%. Selama empat periode tersebut, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tergolong pola hubungan instruktif.

### 3.2. Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama 2017 – 2020 tersaji pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Analisis Rasio Efektivitas

| Tahun       | Realisasi PAD      | Anggaran PAD       | Rasio Efektivitas | Keterangan     |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 2017        | Rp 403.561.238.310 | Rp 399.425.826.000 | 101,04%           | Sangat Efektif |
| 2018        | Rp 325.089.093.092 | Rp 363.038.862.200 | 89,55%            | Cukup Efektif  |
| 2019        | Rp 417.178.099.961 | Rp 441.347.020.000 | 94,52%            | Efektif        |
| 2020        | Rp 329.769.193.224 | Rp 265.502.524.500 | 124,21%           | Sangat Efektif |
| Rata – Rata |                    |                    | 102,33%           | Sangat Efektif |

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil perhitungan di atas menginformasikan bahwa rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 sebesar 101,04% dengan kategori sangat efektif, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 89,55% dengan kategori cukup efektif, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 94,52% dengan kategori efektif, sedangkan tahun 2020 kembali naik menjadi 124,21% dengan kategori sangat efektif.

### 3.3. Rasio Efisiensi

Perhitungan terhadap rasio efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh hasil sebagaimana yang tersaji pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Analisis Rasio Efisiensi

| Tahun | Realisasi Belanja    | Realisasi Pendapatan | Rasio Efisiensi | Keterangan    |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 2017  | Rp 1.957.966.285.066 | Rp 2.271.336.015.858 | 86,20%          | Cukup Efisien |
| 2018  | Rp 1.957.114.127.802 | Rp 2.302.190.543.616 | 85,01%          | Cukup Efisien |
| 2019  | Rp 1.884.681.713.041 | Rp 2.575.439.825.755 | 73,18%          | Efisien       |



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

|             |                      |                      |        |         |
|-------------|----------------------|----------------------|--------|---------|
| 2020        | Rp 1.636.641.956.462 | Rp 2.380.457.680.604 | 68,75% | Efisien |
| Rata – Rata |                      |                      | 78,29% | Efisien |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel di atas, dapat dicermati secara jelas bahwa efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 86,20% dengan kategori cukup efisien, tahun 2018 sebesar 85,01% tergolong cukup efisien, tahun 2019 sebesar 73,18% dengan kategori efisien, dan tahun 2020 sebesar 68,75% dengan kategori efisien.

### 3.4. Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja

#### 3.4.1. Rasio Belanja Operasi

Perhitungan yang telah dilakukan terhadap rasio belanja operasi Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 tersaji pada table 7 di bawah ini:

Tabel 7. Rasio Belanja Operasi

| Tahun       | Realisasi Belanja Operasi | Realisasi Belanja    | Rasio Belanja Operasi |
|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2017        | Rp 1.450.952.672.642      | Rp 1.957.966.285.066 | 74,11%                |
| 2018        | Rp 1.454.440.752.541      | Rp 1.957.114.127.802 | 74,32%                |
| 2019        | Rp 1.498.077.962.197      | Rp 1.884.681.713.041 | 79,49%                |
| 2020        | Rp 1.357.596.932.757      | Rp 1.636.641.956.462 | 82,95%                |
| Rata – Rata |                           |                      | 77,71%                |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah tersaji secara jelas di atas, dapat diketahui bahwa belanja operasi Kabupaten Magelang selama 2017 – 2020 selalu mengalami peningkatan, dengan perolehan nilai masing – masing tahunnya sebesar 74,11%, 74,32%, 79,49%, dan 82,95%.

#### 3.4.2. Rasio Belanja Modal

Perhitungan yang telah dilakukan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang selama 2017 – 2020 dapat dilihat sebagaimana yang tersaji pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Analisis Rasio Belanja Modal

| Tahun       | Realisasi Belanja Modal | Realisasi Belanja    | Rasio Belanja Modal |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| 2017        | Rp 502.862.222.437      | Rp 1.957.966.285.066 | 25,68%              |
| 2018        | Rp 501.727.375.261      | Rp 1.957.114.127.802 | 25,64%              |
| 2019        | Rp 386.529.995.844      | Rp 1.884.681.713.041 | 20,51%              |
| 2020        | Rp 214.407.058.402      | Rp 1.636.641.956.462 | 13,10%              |
| Rata – Rata |                         |                      | 21,23%              |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat jelas bahwa rasio belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan, dengan perolehan nilai masing – masing tahunnya sebesar 25,68%, 25,64%, 20,51%, dan 13,10%.

### 3.5. Rasio Pertumbuhan

#### 3.5.1. Rasio Pertumbuhan Pendapatan



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Hasil perhitungan terhadap rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 secara jelas tersaji pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

| Tahun       | Pendapatan Asli Daerah | Total Pendapatan Daerah | Rasio Pertumbuhan PAD | Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 2017        | Rp 403.561.238.310     | Rp 2.271.336.015.858    | -                     | -                                   |
| 2018        | Rp 325.089.093.092     | Rp 2.302.190.543.616    | -19,44%               | 1,36%                               |
| 2019        | Rp 417.178.099.961     | Rp 2.575.439.825.755    | 28,33%                | 11,87%                              |
| 2020        | Rp 329.769.193.224     | Rp 2.380.457.680.604    | -20,95%               | -7,57%                              |
| Rata - Rata |                        |                         | -4,02%                | 1,89%                               |

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat jelas fluktualisasi terhadap nilai persentase pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020. Rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar -19,44%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 28,33%, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -20,95%. Adapun rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 1,36%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 11,87%, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -7,57%.

### 3.5.2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Hasil perhitungan yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 tersaji secara jelas seperti tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

| Tahun       | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi | Rasio Pertumbuhan Belanja Modal |
|-------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 2017        | Rp 1.450.952.672.642 | Rp 502.862.222.437 | -                                 | -                               |
| 2018        | Rp 1.454.440.752.541 | Rp 501.727.375.261 | 0,24%                             | -0,23%                          |
| 2019        | Rp 1.498.077.962.197 | Rp 386.529.995.844 | 3,00%                             | -22,96%                         |
| 2020        | Rp 1.357.596.932.757 | Rp 214.407.058.402 | -9,38%                            | -44,53%                         |
| Rata – Rata |                      |                    | -2,05%                            | -22,57%                         |

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel di atas memperlihatkan dengan jelas mengenai hasil perhitungan menggunakan rasio pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan belanja operasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Magelang selama 2017 – 2020. Pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Magelang tahun 2018 memperoleh persentase sebesar 0,24%, tahun 2019 rasio pertumbuhan belanja operasi mengalami kenaikan menjadi 3,00%, sedangkan tahun 2020 pertumbuhan belanja operasi turun menjadi -9,38%. Untuk pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2018 memperoleh hasil sebesar -0,23%; 2019 pertumbuhan belanja modal mengalami penurunan menjadi -22,96%; sedangkan 2020 menurun menjadi -44,53%.

### Pembahasan



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan hasil dari rata – rata rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama empat tahun sebagaimana yang tersaji pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2020

| Jenis Rasio                          | Rata - Rata Rasio |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rasio Kemandirian                    | 19,02%            |
| Rasio Efektivitas                    | 102,33%           |
| Rasio Efisiensi                      | 78,29%            |
| Rasio Aktivitas / Keserasian Belanja |                   |
| Rasio Belanja Operasi                | 77,71%            |
| Rasio Belanja Modal                  | 21,23%            |
| Rasio Pertumbuhan                    |                   |
| Rasio Pertumbuhan PAD                | -4,02%            |
| Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah  | 1,89%             |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi    | -2,05%            |
| Rasio Pertumbuhan Belanja Modal      | -22,57%           |

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil perhitungan rata – rata Rasio kemandirian Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh nilai sebesar 19,02% tergolong masih rendah sekali. Nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah bisa digunakan sebagai bentuk representasi tentang sejauh mana tingkat kemandirian suatu daerah yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan daerahnya tanpa bergantung pada pendapatan dari pihak lain. Tingkat kemampuan kemandirian keuangan pemerintah daerah tercermin berdasarkan besar atau kecilnya hasil perbandingan antara PAD dengan pendapatan yang bersumber dari pihak lain (eksternal), contohnya bantuan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pinjaman. Dengan demikian, perolehan nilai sebesar 19,02% tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama empat tahun tersebut tergolong sangat bergantung pada pendapatan transfer untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

Rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh nilai sebesar 102,33%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sudah efektif dalam upaya untuk merealisasikan PAD di atas PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan rasio efektivitas, angka tersebut membuktikan semakin baik juga kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah. Rasio ini akan lebih meyakinkan, apabila didampingi bersama rasio efisiensi.

Rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh nilai sebesar 78,29% yang memiliki arti bahwa selama empat tahun tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan sudah efisien mengalokasikan PAD. Pemerintah daerah (pemda) dapat dinyatakan efisien jika rasio efisiensinya menunjukkan nilai kurang dari seratus persen, sehingga kinerja pemerintah suatu daerah dapat dikatakan sangat baik apabila hasil perhitungan terhadap rasio ini menunjukkan nilai yang semakin rendah.

Rasio keserasian belanja suatu daerah menginformasikan tentang bagaimana aktivitas pemerintah untuk menganggarkan lebih pengalokasian dana yang dimilikinya pada pos belanja rutin dan belanja modal. Apabila pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk belanja rutin dengan persentase yang semakin tinggi, akan berdampak pada belanja modal yang dipakai dalam upaya menyediakan sarana serta prasarana ekonomi untuk publik akan mendapatkan persentase yang semakin kecil [19]. Rata – rata rasio belanja operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 memperoleh nilai sebesar 77,71 %, sedangkan rasio belanja modalnya memperoleh nilai sebesar 21,23%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang lebih besar digunakan dalam upaya memenuhi belanja rutin sehingga menyebabkan kebutuhan akan belanja modal Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh persentase kecil.



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara lebih spesifik terbagi menjadi empat rasio, yaitu 1) rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, 2) pertumbuhan pendapatan daerah, 3) pertumbuhan belanja operasi daerah, dan 4) pertumbuhan belanja modal daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 mendapatkan rata – rata nilai rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar -4,02%, pertumbuhan pendapatan daerah memperoleh nilai sebesar 1,89%, pertumbuhan belanja operasi daerah memperoleh nilai sebesar -2,05%, dan pertumbuhan belanja modal daerah memperoleh nilai sebesar -22,57%. Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut, maka rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan belanja modal daerah, dan pertumbuhan belanja operasi untuk Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020 menunjukkan arah pertumbuhan negatif yang disebabkan karena nominal Pendapatan Asli Daerah selama empat tahun tersebut cenderung fluktuatif, sedangkan belanja modal dan belanja rutin daerah setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

#### IV. KESIMPULAN

Studi yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama empat tahun berturut – turut yaitu tahun 2017 – 2020 yang diukur menggunakan analisis rasio memperoleh hasil rerata sebagai berikut:

- Perolehan nilai 19,02% mengindikasikan bahwa dalam upaya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Magelang, total pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain memperoleh hasil yang lebih besar atau lebih dominan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah Kabupaten Magelang dinilai belum mandiri dalam membiayai segala kepentingan daerahnya.
- Rasio efektivitas dan efisiensi masing – masing memperoleh nilai sebesar 102,33% dan 78,29% mengindikasikan bahwa kemampuan daerah Kabupaten Magelang tergolong daerah yang sangat efektif dalam merealisasikan PAD di atas anggaran PAD yang telah ditetapkan dan sudah efisien karena memperoleh persentase di bawah 100% untuk rasio efisiensinya.
- Rasio aktivitas memperoleh nilai untuk belanja operasi sebesar 77,71% dan belanja modal sebesar 21,23%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa dana Pemerintah Kabupaten Magelang lebih dialokasikan ke dalam belanja operasi sehingga kebutuhan belanja modal memperoleh persentase yang lebih kecil. Oleh sebab ketidakseimbangan nilai antara dua persentase rasio belanja tersebut, maka rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Magelang dinilai kurang serasi.
- Rasio pertumbuhan memperoleh nilai untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -4,02%, pendapatan daerah sebesar 1,89%, belanja operasi daerah sebesar -2,05%, dan belanja modal daerah sebesar -22,57%. Nilai rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja operasi, dan belanja modal menunjukkan arah perkembangan yang bersifat negatif. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan memperoleh nilai yang positif, namun angka tersebut masih rendah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebaiknya setiap tahunnya terus berupaya untuk menaikkan total pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar pertumbuhan Daerah Kabupaten Magelang berjalan ke arah yang positif dan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini sangat dibutuhkan supaya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tidak menggantungkan perolehan pendapatan dari pemerintah pusat yang berupa dana transfer atau dana perimbangan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya. Selain itu, karena hasil analisis perhitungan antara rasio belanja operasi daerah dan belanja modal daerah menunjukkan indikasi kurang serasi, maka Pemerintah Kabupaten Magelang perlu untuk menekan nominal belanja rutin supaya nominal belanja modal untuk pembangunan infrastruktur daerah bisa meningkat.

Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengambil objek penelitian yang tidak hanya berpaku pada satu instansi agar diperoleh hasil penelitian yang dapat diperbandingkan. Selain itu, penambahan teknik analisis data yang difungsikan juga diperlukan guna memperoleh hasil penelitian yang lebih beragam.

#### REFERENSI

- [1] Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.



DOI: 10.52362/jisamar.v6i3.819

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [2] Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan. *AESTASI JIA*, 1(1), 16-28.
- [3] Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2014). Undang – Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(2), 116-122.
- [4] Sari, N. D., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787.
- [5] Rosemary., Chinyeaka Justine., dan Barisua Barry. (2016). Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38-54.
- [6] Rondonuwu, Ritno H., Jantje J. Tinangon., dan Novi Budiarmo. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(4), 23-32.
- [7] Aziz, Asmaul. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *EKSIS*, 11(1), 86-101.
- [8] Safwan, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 133-139.
- [9] Darwanis dan Ryanda Saputra. (2014). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 183-199.
- [10] Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Qur'ani, S., & Panggiarti, E. K. (2021). The Analysis Of Territory Financial Ratio As Performance Value In The Government Of Magelang City. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 60-70.
- [12] Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- [13] BPPKAD Kabupaten Magelang. (2022). Sibata Online: Bankdata. Retrieved from <http://sibata.magelangkab.go.id> .
- [14] Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 2)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [16] Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- [17] Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- [18] Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [19] Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.

